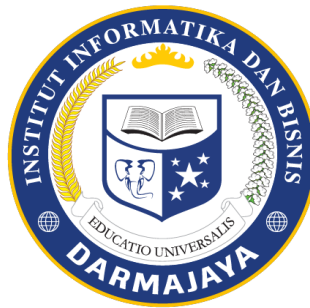


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Panjang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ALFIRA WIDYA PANGESTIKA

NPM: 1412120017

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Panjang)**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI



Disusun Oleh:

ALFIRA WIDYA PANGESTIKA

NPM: 1412120017

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2018**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan merupakan pertanggungjawaban saya sepenuhnya.

Bandar Lampung, 18 Oktober2018

Alfira Widya Pangestika

1412120017

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

NAMA : ALFIRA WIDYA PANGESTIKA

NPM : 1412120017

JURUSAN : AKUNTANSI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Penutup Studi guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI** pada Jurusan **AKUNTANSI IIB Darmajaya**.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Jaka Darmawan, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPAi
NIK. 13820316

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Anik Irawati, S.E, M.Sc
NIK. 01170305

RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : Alfira Widya Pangestika
NPM : 1412120017
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulang Bawang, 11 Mei 1996
Agama : Islam
Alamat : Perum BKP Blok K116, Kel. Kemiling
Permai, Kec. Kemiling
Suku : Jawa
Kewarganegaraan : Indonesia
e-mail : alfirawidyap@gmail.com
No. Hp : 0823-7868-8325

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

a. TK Makarti Mukti Tama	Tahun	2001-2002
b. SD Negeri 2 DWT Jaya	Tahun	2002-2008
c. SMPNegeri 28 Bandar Lampung	Tahun	2008-2011
d. SMK Persada	Tahun	2011-2014

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan diatas adalah benar.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2018

ALFIRA WIDYA PANGESTIKA
NPM. 1412120017

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati

kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua Orangtua tercinta, MamaWidyawati

Saya sangat bangga telah lahir menjadi anakmu& saya dapat menjalankan Amanatmu selama ini hingga saya mendapat gelar akademik yang pertama. Bapak Slamet Mulyadi yang telah memberikan dukungan do'a, nasehat dan material selama ini kepadaku.

Kemudian untuk adik tercinta (Faridah & Faqih Al-arif Billah) saya berterimakasih atas do'a dan dukungan yang secara tulus telah kalian berikan.

Dan ucapan terimakasih tak terhingga juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi, di IIB Darmajaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

"Fashbir shabran jamiilan...
Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik
Allah selalu menghadirkan segala sesuatu yang indah pada
waktunya, yakinilah dengan Bismillah"
(Q.S Al-Ma'arij : 70)

"Maka Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Yang Engkau Dustakan"
(Q.S Ar-Rahman : 13)

Semangat untuk yang sedang berjuang, semangat untuk yang
sedang diperjuangkan
Setelah semuanya, maka akan ada akhirnya Insya Allah yang Lillah
jadi berkah

Bahagia adalah sebuah HAK, sedangkan KERJA KERAS adalah
sebuah KEWAJIBAN, lakukan kewajiban dan raihlah hakmu.
(Merry Riana)

Di dalam hidup ini kita tidak bisa berharap segala yang kita
dambakan bisa diraih dalam sekejap. Lakukan saja perjuangan dan
terus berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi
selangkah.
(Merry Riana)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
(Studi Empiris Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)**

Oleh

Alfira Widya Pangestika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sampel dalam penelitian ini diambil 28 perusahaan dengan laporan keuangan selama dua tahun., dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis uji regresi berganda.. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS Versi 20. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kata kunci : Kepatuhan, sikap, motivasi, kesadaran, pengetahuan perpajakan dan persepsi, sanksi dan PBB.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Empiris Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 jurusan akuntansi di IIB Darmajaya Bandar Lampung. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil disusun dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan saran dari semua pihak oleh karena itu dengan penuh keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc selaku Rektor IIB Darmajaya.
2. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., MT selaku Wakil Rektor I IIB Darmajaya.
3. Bapak Ronny Nazar, S.E., MT selaku Wakil Rektor II IIB Darmajaya.
4. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos., MM selaku Wakil Rektor III IIB Darmajaya.
5. Bapak Prof. Zulkarnain Lubis, MS., PhD selaku Wakil Rektor IV IIB Darmajaya.
6. Bapak Dr. Anuar Sanusi, S.E., M.Si selaku Dekan FEB IIB Darmajaya.
7. Bapak Dr. Lukmanul Hakim, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan FEB IIB Darmajaya.
8. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya dan selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi..
9. Ibu Sri Maryati, S.E., M.Sc selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya.
10. Bapak Jaka Darmawan, S.E.,Ak.,M.Ak.,CA.,CPAi selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membantu serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

11. Ibu Reva Meiliana, S.E., M.Acc., Akt selaku Dosen Penguji skripsi yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi.
12. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama menempuh pendidikan di IIB Darmajaya.
13. Kedua orangtua penulis Ibu Widyawati & Bapak Slamet Mulyadi yang telah memberikan banyak kasih sayang, dukungan, dan cinta sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu.
14. Sahabat – sahabat seperjuangan dalam segala hal Ani Safitri, S.E yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyelesaian masa studi penulis yang selalu ada untuk penulis.
15. Seluruh teman – teman angkatan di IIB Darmajaya yang telah memberikan banyak masukan selama ini.
16. Seluruh Staf dilingkungan di IIB Darmajaya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi
17. Almamaterku tercinta IIB Darmajaya yang selama ini telah menjadi media bagiku untuk menggali ilmu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Tuhan YME. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis berharap saran yang bersifat membangun dalam perbaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Amiin.

Bandar lampung, 18 Oktober 2018

Penulis

Alfira Widya Pangestika
NPM 1412120017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Teori Atribusi	11
2.2 Teori Pembelajaran Sosial.....	11
2.3 Kepatuhan Pajak.....	12
2.4 Sikap Wajib Pajak	14
2.5 Motivasi Wajib Pajak	15
2.6 Kesadaran Wajib Pajak	15
2.7 Pengetahuan Perpajakan.....	16
2.8 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB	16
2.9 Penelitian Terdahulu.....	18
2.10 Kerangka Pemikiran	21
2.11 Bangunan Hipotesis.....	21

2.11.1	Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.11.2	Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.11.3	Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.11.4	Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.11.5	Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25

BAB III METODE PENELITIAN..... 27

3.1	Sumber Data	27
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.3	Populasi dan Sampel.....	28
3.3.1	Populasi	28
3.3.2	Sampel.....	28
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	29
3.4.1	Variabel Independen	29
3.4.2	Variabel Dependen.....	30
3.5	Metode Analisis Data.....	33
3.5.1	Statistik Deskriptif	33
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	34
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	35
3.5.4	Analisis Model Regresi	36
3.5.5	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R₂</i>)	37
3.5.6	Uji F	37
3.6	Uji t	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 39

4.1	Deskripsi Data.....	39
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	39
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	43
4.2	Hasil Analisis Data	43
4.2.1	Statistik Deskriptif	43
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data	46
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	50
4.2.4	Uji Regresi	53
4.2.5	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R₂</i>)	55
4.2.6	Uji F	56
4.3	Uji t	56
4.4	Pembahasan	58

4.4.1	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.....	58
4.4.2	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.....	58
4.4.3	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.....	59
4.4.4	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.....	59
4.4.5	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.....	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Keterbatasan	62
5.3 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 1 Target dan realisasi PBB Kecamatan Panjang Tahun 2012-2016.....	5
Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3 1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 4 1 Karakteristik Data Kuesioner	39
Tabel 4 2 Deskripsi Responden (N=100)	40
Tabel 4 3 StatistikDeskriptif.....	44
Tabel 4 4 Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4 5 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4 6 Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4 7 Hasil Uji Multikolinieritas.....	51
Tabel 4 8 Hasil Uji Regresi	53
Tabel 4 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4 10 Hasil Uji F	56
Tabel 4 11 Hasil Uji T	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan nonpajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan negara dituntut untuk terus meningkat.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya maksimal. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Purnamasari, dkk (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika pemahaman dan kesadaran pajak tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Selain itu, Oladipupo (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah memenuhi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak. Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang dipertimbangkan antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko karir wajib pajak dan risiko keselamatan.

Kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan konsumsi seseorang. Dimana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu, akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi. Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat sudah menjadi wajib pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB. Meskipun pemerintah setempat setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan

oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi patuh terhadap pajak. Selaian memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. Sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di televisi, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan masyarakat patuh dan ikut serta dalam pembangunan suatu daerah berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. PBB mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Bagian PBB yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam otonomi daerah karena PBB termasuk dalam golongan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan menghapus denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta izin gangguan atau HO. Penghapusan denda ini diharapkan bias membuat masyarakat sadar membayar pajak. Hingga saat ini November 2017, realisasi pajak yang masuk ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung baru Rp 66,42 miliar. Sedangkan Rp 47,05 miliar masih tertunggak. Berdasarkan jumlah wajib pajak atau SPT, dari 246.758 wajib pajak, baru 138.794 yang membayar. Sementara 107.964 wajib pajak masih belum menyetorkan kewajibannya. Kecamatan Telukbetung Barat menjadi kecamatan yang paling tinggi menunggak PBB-P2. Dari target Rp 4,23 miliar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 10.557 baru terealisasi 30,1 persen (Rp 1,27 miliar). Disusul dengan Telukbetung Timur dengan tunggakan masih 66,7 persen atau Rp 1,73 miliar; Tanjung Senang dengan tunggakan masih 60,9 persen atau Rp 2,27 miliar. Sementara kecamatan yang paling sedikit menunggak

ialah Panjang dengan total tunggakan tinggal 13,8 persen dengan nilai Rp 2,27 miliar; dan Telukbetung Selatan dengan jumlah tunggakan Rp 1,25 miliar dengan persentase 29,1 persen. (Kupastuntas.co)

Kecamatan Panjang yang terletak di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dalam pelaksanaan terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut merupakan gejala yang sudah umum bagi semua daerah yaitu tidak terlepas dari masyarakat dan aparat petugas pemungutan pajak. Selama ini proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang belum secara optimal dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan beserta jajarannya, disebabkan oleh berbagai factor-faktor penghambat yang belum ditemukan solusinya.

Tabel 1 1
Target dan realisasi PBB Kecamatan Panjang Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2012	6.737.390.093	6.298.215.562	93.48
2013	9.944.177.134	8.178.871.769	82.25
2014	9.681.296.021	7.437.057.630	76.29
2015	10.355.710.063	7.997.299.577	70.42
2016	13.185.842.211	13.786.467.861	104.56

Sumber : BPPRD Kecamatan Panjang 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir target penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang cukup baik akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pemungutannya agar tercapainya realisasi pemungutan yang optimal.

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebagian dari beberapa pajak lain. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan yang potensial berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Penelitian ini merupakan penggabungan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shiddiq (2011) dan Utomo (2011) di Tangerang dan Tangerang Selatan, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendidikan wajib pajak, dan tingkat pendapatan keluarga serta persepsi wajib pajak tentang sanksi denda pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengambil objek kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berada pada Kecamatan Panjang, di Kota Bandar Lampung dan menggabungkan variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Shiddiq dan Utomo (2011) untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi denda pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang.”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan agar penelitian lebih terfokus.

1. Secara garis besar yang diteliti adalah tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.
2. Objek penelitian ini difokuskan kepada wajib pajak PBB di wilayah Kota Bandar Lampung.
3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan variabel bebas penelitian ini faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan tentang tata cara pembayaran pajak, pendidikan wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
5. Apakah terdapat pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
6. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendapatan kepala keluarga terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
7. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendapatan kepala keluarga terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis/Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan pajak yang diterapkan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti seperti pengertian dan peraturan tentang perpajakan serta fungsi perpajakan, wajib pajak dan manfaat pajak bumi dan bangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta pengembangan hipotesis penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendemostrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II .

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka penelitian.

LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi tentang lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil olahan data menggunakan program SPSS versi 20.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz (1958) teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika perilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Robbin (2018) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu.

2.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Jatmiko (2006).

Menurut Bandura (1977) ada empat proses dalam pembelajaran sosial, yaitu:

1. Proses Perhatian

Individu akan belajar untuk mengenali dan mencurahkan perhatian kepada fitur yang dianggap penting.

2. Proses Penyimpanan

Individu akan mengingat suatu model ketika model tersebut tidak lagi ada.

3. Reproduksi motorik

Individu mengubah pengamatan menjadi tindakan. Individu akan melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.

4. Penguatan

Individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model ketika ada insentif positif atau penghargaan.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pajak, baik dari pemahaman pajaknya maupun sistem prosedur pembayaran pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, teori ini cukup relevan apabila di hubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang artinya tunduk, sifat patuh, ketaatan kepada ajaran atau aturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ramadiansyah, dkk., (2014) menjelaskan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang (Oktaviana, 2018).

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi :

- 1) Wajib pajak membayar dengan tepat waktu
- 2) Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material adalah:

- 1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas pajak membutuhkan informasi.
- 2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

2.4 Sikap Wajib Pajak

Menurut Robbinson (2011) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya (Utomo, 2011). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Utomo, 2011).

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.

2.5 Motivasi Wajib Pajak

Menurut Frengki (2011) mendefinisikan motivasi berasal dari kata lain “MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya gerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Melayu (2011) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulkan motif atau dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (Shiddiq, 2011).

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011).

2.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

2.8 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Menurut Untung (2011) persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Shiddiq, 2011).

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi bagi wajib pajak adalah apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen)sebulan, yang dihitung dari sat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal :

- a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.

Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal :

- a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.
- c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
- e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan ;

Dipidana dengan pidana kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak

sengaja, lali, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

Untuk sebab kesengajaan :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1
Penelitian Terdahulu

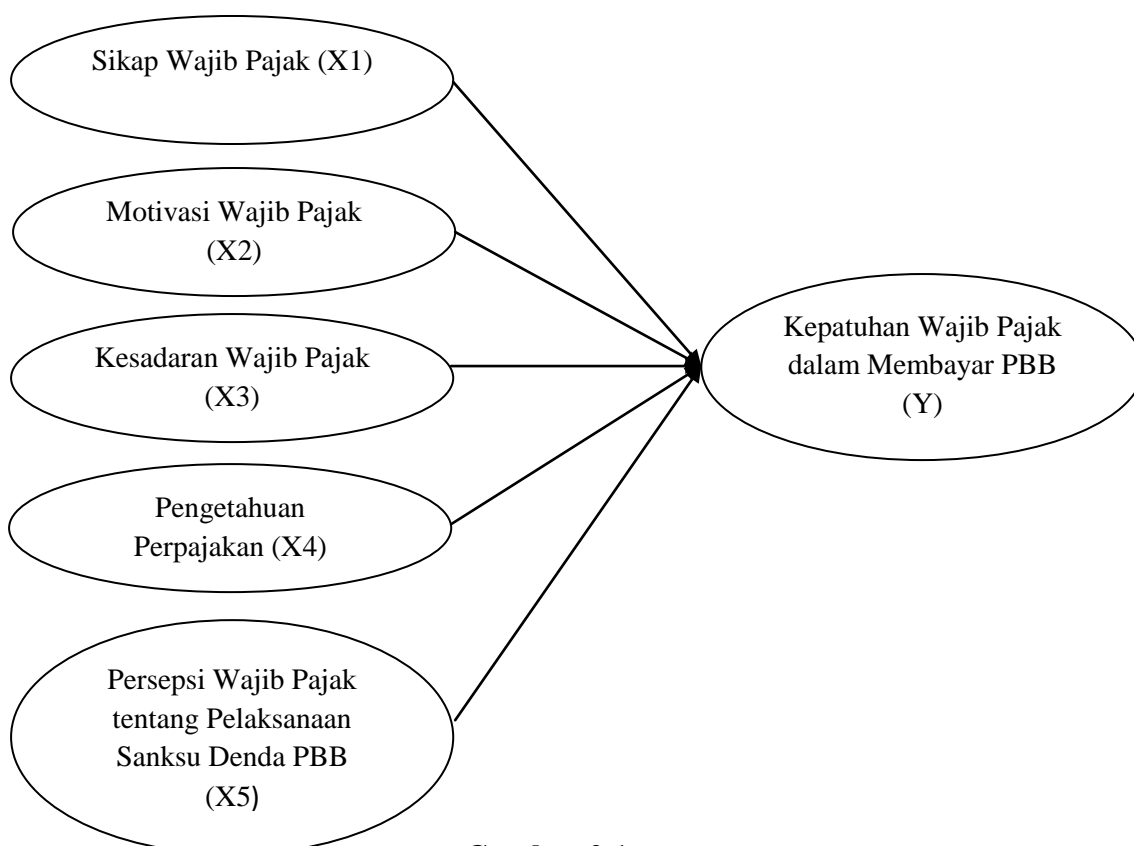
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel penelitian	Alat analisis penelitian	Hasil penelitian
1	Muhammad Ash Shiddiq (2011)	Independen Sikap Wajib pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan	Model Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB. Sementara motivasi wajib pajak dan pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB.

		Wajib Pajak Dependen Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Tangerang Selatan.		
2	Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)	Independen Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Dependen Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Pamulang	Model Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Riana Widiastuti (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Klaten	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, control keperilakuan yang dipersepsikan, kesadaran WP untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan.

4	Fitri Aprilia (2015)	Independen Sikap, Motivasi, Tingkat Pendapatan, Persepsi Wajib Pajak, dan Kondisi Perekonomian Dependen Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Bandar Lampung	Model Analisis Regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, motivasi, tingkat pendapatan, dan persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar PBB, sedangkan kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar PBB.
5	Tri Mulyani (2015)	Independen Kesadaran Wajib Pajak, Kemampuan Wajib Pajak, dan Pelayanan Wajib Pajak Dependen Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Tanjung Senang	Analisis Regresi Logistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dan pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sedangkan untuk kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
6	Nurul Oktaviana (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandar Lampung	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, nasionalisme, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh antara sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendidikan wajib pajak, tingkat pendapatan kepala keluarga dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan kerangka konseptuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2 1
Kerangka Pemikiran.

2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Indrawijaya mendefinisikan sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari

wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Aprilia, 2015).

Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah “sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon” (Aprilia, 2015). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengacu kepada pengertian yang dijelaskan menurut Robbin (2011) sikap adalah “Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu” (Aprilia, 2015).

Berdasarkan penelitian Aprilia 2015, sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Bandar Lampung.

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa.

Ha₁ : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.2 Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi berasal dari kata lain “MOVERE” yang berarti “dorongan atau daya gerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Melayu (2011) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.

Pengertian motivasi adalah pemberian atau penimbulkan motif atau dapat pula diartikan sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (Shiddiq, 2011).

Ha₂ : Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.3 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011).

Berdasarkan penelitian Utomo 2011, kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Ha₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.4 Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Utomo, 2011). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian Utomo 2011, pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan

hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Ha₄ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.11.5 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Untung (2011) persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Shiddiq, 2011).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Shiddiq 2011, yang membuktikan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik atau memandang bahwa sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dari waktu ke waktu dan mampu menjangkau para pelanggar, maka setiap wajib pajak akan mematuhi pembayaran PBB mengingat sanksi yang langsung diterapkan kepadanya apabila melanggar.

Ha₅ : Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaa Sanksi Denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang baik berupa buku, jurnal, majalah dan dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan kajian pustaka yaitu media iklan televisi, efektifitas, iklan, internet kesadaran merek.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga cara untuk melakukannya yaitu :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.

2. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok untuk digunakan bila jumlah responden cukup besar dan

tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2017) observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi dengan mengamati gejala dan fakta mengenai unit analisis dalam penelitian ini sedangkan untuk kuesioner melibatkan tanggapan konsumen secara langsung mengenai variabel-variabel yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel penelitian ini adalah metode *Convenience Sampling*. Metode *Convenience Sampling* adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience Sampling*, berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Metode *Convenience Sampling* merupakan metode memilih sampel dari elemen populasi (orang atau

kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Utomo, 2011). Alasan pemilihan teknik sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *simple random sampling* menurut ketentuan slovin (Sanusi, 2014) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

$$n = \frac{246.758}{1 + 246.758 \times 0,1^2}$$

$$n = 99,9 = 100$$

Jadi jumlah minimal sampel yang dapat mewakili populasi yang diteliti adalah sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen untuk penelitian ini ada lima yaitu:

1. Sikap Wajib Pajak (X^1)

Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*)

maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut.(Salman dan Farid dalam Shiddiq, 2011).

2. Motivasi Wajib Pajak (X^2)

Motivasi berarti “dorongan atau daya penggerak”.Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pengembangan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. (Frengki dalam Shiddiq, 2011).

3. Kesadaran Wajib Pajak (X^3)

Kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas atas kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan pemerintah (Munari dalam Shiddiq, 2011).Yang menimbulkan konsekuensi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

4. Pengetahuan Perpajakan (X^4)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

5. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X^5)

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB diartikan sebagai pandangan seseorang mengenai suatu kondisi tertentu, dimana dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan sanksi denda PBB (Astuti dan Rini dalam Shiddiq, 2011).

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu dalam Utomo 2011).

Tabel 3 1
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Sikap Wajib Pajak (X^1)	Reaksi terhadap Peraturan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman wajib pajak tentang UU PBB 2. Sosialisasi PBB yang dilakukan pemerintah 3. Kemudahan dalam prosedur pembayaran pajak 4. Sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak 5. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak 	Likert
Motivasi Wajib Pajak (X^2)	<p>Ekstrinsik</p> <p>Intrinsik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam mengisi formulir PBB 2. Kantor pajak dekat dari rumah 3. Kantor pajak mudah di jangkau 4. Sistem dan prosedur di kantor pajak mudah dipahami 5. Terdapat petugas yang membantu 6. Pengabdian WP terhadap Negara 7. Partisipasi WP dalam pembangunan 8. Citra yang baik dan bersih aparat pajak 	Likert

Kesadaran Wajib Pajak (X^3)	Dorongan diri sendiri Fungsi pajak Hak dan kewajiban wajib pajak Perilaku wajib pajak terhadap pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dorongan hati nurani 2. Tanpa paksaan 3. Memahami hak dan kewajiban 4. Bangga menjadi WP 5. Sadar terhadap fungsi pajak 6. Rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pajak 7. Memahami hak dan kewajiban WP 8. Ketaatan WP untuk membayar pajak 9. Respon WP atas perubahan tanah dan bangunan 	Interval
Pengetahuan Perpajakan (X^4)	Pengetahuan Perpajakan tentang Tata Cara Membayar Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan WP terhadap fungsi pajak 2. Pengetahuan WP terhadap peraturan pajak 3. Pengetahuan WP terhadap pendaftaran sebagai WP 4. Pengetahuan WP terhadap tata cara pembayaran pajak 5. Pengetahuan WP terhadap tarif pajak 	Interval
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X^5)	Tanggapan WP tentang Sanksi dalam Pembayaran PBB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sanksi denda PBB 2. Persepsi tentang sanksi denda PBB 3. Sanksi denda tidak memberatkan 4. Konsisten 5. Mampu menjangkau 	Likert

		para pelanggar 6. Sanksi denda PBB relatif ringan 7. Tegas	
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)	Ketaatan terhadap Peraturan Perpajakan	1. Membayar pajak tepat pada waktunya 2. Membayar pajak tanpa ada pemaksaan 3. Kepatuhan terhadap kewajiban WP 4. Kepatuhan terhadap sanksi pajak 5. Melaporkan informasi	Interval

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.0 untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda ini diperlukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran umum responden, seperti jenis kelamin, status responden dan tingkat pendidikan yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS v.20. Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang

utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi jumlah data, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum serta *standard deviasi* (Sudarmanto,2013).

3.5.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis *korelasi bilvariate* dengan melihat *output Pearson Correlation* (Ghozali, 2013). Dengan kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ item pertanyaan/ Pernyataan dikatakan valid. Setelah nilai thitung diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai thitung tersebut dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan (dk) = n –

2. Kaidah keputusannya adalah :

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid. Namun pada penelitian ini validitas item diukur dengan membandingkan nilai $r \text{ hitung}$ dan $r \text{ tabel}$, yaitu $r \text{ hitung}$ didapat dari hasil *Output Cronbach Alpha* pada kolom *Coorelated Item Total Correlation*. Apabila nilai $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat *cronbach's alpha*. Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$ (Ghozali,

2013). Instrumen yang reliabel belum tentu valid dan instrumen yang valid belum tentu reliabel, sehingga reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen (Sugiyono, 2017).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk mengetahuisifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengeahui akankah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Infkation Factor* (VIP).Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance > 0,10$ atau sama dengan nilai VIF.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafikplot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Analisis Model Regresi

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antaravariabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Bentuk persamaan regresi linear berganda menurut sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5$$

Keterangan :

Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

X1 : Sikap Wajib Pajak

X2 : Motivasi Wajib Pajak

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

X4 : Pengetahuan Perpajakan

X5 : Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

β_0 : Konstanta

β : Koefisien Determinasi

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel dependen. Bila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif, maka *adjusted R²* dianggap nol.

3.5.6 Uji F

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig.} \leq 5\%$), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.
2. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig.} > 5\%$), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

3.6 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan : Jika t hitung lebih kecil dari t tabel,

maka H_a diterima, sedangkan jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_a ditolak. Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk file-file dan data ini harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian ataupun orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data (Sugiono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4 1
Karakteristik Data Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah kuesioner
1	Kuesioner yang dikirim	100
2	Kuesioner yang kembali	100
3	Kuesioner yang tidak kembali	0
4	Kuesioner yang diolah	100
5	Persentase kuesioner yang diolah	100%

Fokus responden didalam penelitian ini yaitu wajib pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi responden. Sehingga dapat diketahui responden yang ada sebanyak 100 orang. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui total kuesioner yang direspon dan dapat digunakan untuk mengolah data sebanyak 100 kuesioner yaitu 100% dari total kuesioner yang disebar. Sedangkan

deskripsi responden dalam penelitian ini mengenai jenis kelamin, status, pendidikan dan tingkat pendapatan kepala keluarga yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4 2
Deskripsi Responden (N=100)

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin :		
Laki-laki	64	64%
Perempuan	36	36%
Total :	100	100%
Status :		
Menikah	87	87%
Belum Menikah	13	13%
Total :	100	100%
Pendidikan :		
SD	2	2%
SMP	10	10%
SMA	62	62%
Diploma	8	8%
Strata 1	18	18%
Total :	100	100%
Pekerjaan :		
Pegawai Pemerintah	20	20%
Pegawai Swasta	17	17%
Pedagang	15	15%
Penyedia Jasa	7	7%
Lainnya	41	41%
Total :	100	100%
Tipe Rumah :		

Permanen	62	62%
Semi Permanen	38	38%
Total :	100	100%
Pendapatan Perbulan :		
< 1juta	25	25%
1-3 juta	63	63%
4-7 juta	8	8%
7-10 juta	2	2%
>10 juta	2	2%
Total :	100	100%
Alat Transportasi :		
Mobil	14	14%
Motor	71	71%
Angkutan Umum	13	13%
Ojek	2	2%
Total :	100	100%
Beban Tanggungan :		
Tidak ada Tanggungan	14	14%
1-3 orang	62	62%
4-7 orang	22	22%
> 8 orang	2	2%
Total :	100	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Profil jenis kelamin digunakan untuk mengetahui proporsi responden laki-laki dan perempuan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64 orang (64%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (36%).

2. Profil status pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berstatus menikah sebanyak 87 orang (87%) dan responden yang berstatus belum menikah sebanyak 13 orang (13%).
3. Profil pendidikan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang (2%), SMP sebanyak 10 orang (10%), SMA sebanyak 62 orang (62%), Diploma sebanyak 8 orang (8%) dan responden yang memiliki pendidikan terakhir strata 1 sebanyak 18 orang (18%).
4. Profil pekerjaan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang bekerja sebagai pegawai pemerintah sebanyak 20 orang (20%), pegawai swasta sebanyak 17 orang (17%), pedagang sebanyak 15 orang (15%), penyedia jasa sebanyak 7 orang (7%) dan lainnya sebanyak 41 orang (41%).
5. Profil tipe rumah pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki tipe rumah permanen sebanyak 62 orang (62%) dan responden yang memiliki tipe rumah semi permanen sebanyak 38 orang (38%).
6. Profil pendapatan perbulan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendapatan perbulan dibawah 1 juta sebanyak 25 orang (25%), 1-3 juta sebanyak 63 orang (63%), 4-7 juta sebanyak 8 orang (8%), 7-10 juta sebanyak 2 orang (2%) dan responden yang memiliki pendapatan perbulan diatas 10 juta sebanyak 2 orang (2%).
7. Profil alat transportasi pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang menggunakan alat transportasi mobil sebanyak 14 orang (14%), motor sebanyak 71 orang (71%), angkutan umum sebanyak 13 orang (13%) dan responden yang menggunakan alat transportasi ojek sebanyak 2 orang (2%).
8. Profil alat rumah tangga pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki alat rumah tangga seperti televisi sebanyak 68 orang (68%), LCD sebanyak 3 orang (3%), Home theater sebanyak 2 orang (2%), AC sebanyak 3 orang (3%), kulkas sebanyak 17 orang (17%), notebook sebanyak 6 orang (6%) dan responden yang memiliki alat rumah tangga seperti dispenser sebanyak 1 orang (1%).

9. Profil beban tanggungan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki beban tanggungan 1-3 orang sebanyak 62 orang (62%), 4-7 orang sebanyak 22 orang (22%), lebih dari 8 orang sebanyak 2 orang (2%) dan responden yang tidak ada beban tanggungan sebanyak 14 orang (14%).

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

4.2 Hasil Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan SPSS 20, maka hasil penelitian yang diperoleh dari data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.2.1 Statistik Deskriptif

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan-pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel, baik itu variabel dependen maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB dan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dimana dalam kuesioner tersebut terdapat 44 pernyataan yang terbagi yakni 6 pernyataan yang digunakan untuk mewakili variabel dependen Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, 5 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu variabel Sikap wajib pajak, 8 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu variabel Motivasi wajib pajak, 12 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu variabel Kesadaran wajib pajak, 7 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu variabel Pengetahuan perpajakan dan 6 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu

variabel Persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB. Pernyataan tersebut kiranya dapat mewakili setiap variabel baik variabel dependen maupun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai Sikap wajib pajak, Motivasi wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB dan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= ragu-ragu, 4= setuju dan 5=sangat setuju.

Tabel 4 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap WP	100	11	25	20.73	2.639
Motivasi WP	100	26	40	34.19	3.113
Kesadaran WP	100	33	60	50.37	5.100
Pengetahuan Perpajakan	100	13	35	28.86	3.127
Persepsi WP tentang Denda PBB	100	12	30	23.72	3.414
Kepatuhan WP dalam membayar PBB	100	16	30	24.12	3.029
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) dari penelitian ini adalah sebanyak 100 data. Maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen untuk Kepatuhan WP dalam membayar PBB diperoleh rata-rata sebesar 24,12 dengan nilai tertinggi 30 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 16 didapat dari pertanyaan dengan nilai 1= sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta

standar deviasinya 3,029. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP dalam membayar PBB memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai mean (Ghozali,2013).

2. Rata-rata *mean* untuk variabel bebas (independen) yaitu
 - a. Sikap wajib pajak memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 20,73 dengan nilai tertinggi 25 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 11 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta standar deviasinya 2,639. Hal ini berarti sikap wajib pajak memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
 - b. Motivasi wajib pajak memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 34,19 dengan nilai tertinggi 40 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 26 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta standar deviasinya 3,113. Hal ini berarti motivasi wajib pajak memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
 - c. Kesadaran wajib pajak memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 50,37 dengan nilai tertinggi 60 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 33 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta standar deviasinya 5,100. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
 - d. Pengetahuan perpajakan memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 28,86 dengan nilai tertinggi 35 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 13 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta standar deviasinya 3,127. Hal ini berarti pengetahuan

perpajakan memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

- e. Persepsi wajib pajak tentang denda PBB memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 23,72 dengan nilai tertinggi 30 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 5=sangat setuju dan nilai terendah sebesar 12 didapat dari pertanyaan yang menjawab dengan nilai 1=sangat tidak setuju dan 2=tidak setuju serta standar deviasinya 3,414. Hal ini berarti persepsi wajib pajak tentang PBB memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *pearson correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 atau sig. < 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di atas 0,05 atau sig. > 0,05 maka data yang diperoleh adalah tidak valid (Ghozali, 2013). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut

Tabel 4 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation Butir Soal	R Tabel	Kesimpulan
Sikap wajib pajak	X1.1	0,523	0,197	Valid
	X1.2	0,600	0,197	Valid
	X1.3	0,514	0,197	Valid
	X1.4	0,486	0,197	Valid
	X1.5	0,398	0,197	Valid

Motivasi wajib pajak	X2.1	0,426	0,197	Valid
	X2.2	0,274	0,197	Valid
	X2.3	0,242	0,197	Valid
	X2.4	0,492	0,197	Valid
	X2.5	0,364	0,197	Valid
	X2.6	0,312	0,197	Valid
	X2.7	0,326	0,197	Valid
	X2.8	0,220	0,197	Valid
Kesadaran wajib pajak	X3.1	0,573	0,197	Valid
	X3.2	0,554	0,197	Valid
	X3.3	0,515	0,197	Valid
	X3.4	0,593	0,197	Valid
	X3.5	0,623	0,197	Valid
	X3.6	0,530	0,197	Valid
	X3.7	0,515	0,197	Valid
	X3.8	0,378	0,197	Valid
	X3.9	0,424	0,197	Valid
	X3.10	0,485	0,197	Valid
	X3.11	0,379	0,197	Valid
	X3.12	0,385	0,197	Valid
Pengetahuan perpajakan	X4.1	0,483	0,197	Valid
	X4.2	0,606	0,197	Valid
	X4.3	0,533	0,197	Valid
	X4.4	0,473	0,197	Valid
	X4.5	0,566	0,197	Valid
	X4.6	0,448	0,197	Valid
	X4.7	0,488	0,197	Valid
Persepsi wajib pajak tentang denda PBB	X5.1	0,577	0,197	Valid
	X5.2	0,552	0,197	Valid
	X5.3	0,377	0,197	Valid
	X5.4	0,475	0,197	Valid
	X5.5	0,525	0,197	Valid
	X5.6	0,480	0,197	Valid
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Y.1	0,343	0,197	Valid
	Y.2	0,210	0,197	Valid
	Y.3	0,358	0,197	Valid
	Y.4	0,287	0,197	Valid
	Y.5	0,400	0,197	Valid
	Y.6	0,469	0,197	Valid

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 20 pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi *product moment* untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB adalah valid Instrumen tersebut dapat dikatakan valid karena mempunyai r hitung $>$ r table (0,197) pada $n= 100-2 = 98$ dengan signifikan 0,05.. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah valid. Maka dalam melakukan pengujian selanjutnya, 44 pernyataan ini dapat digunakan kembali.

1. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat *cronbach's alpha*. Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,70 (Ghozali, 2013). Hasil uji Reliabilitas instrument dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbanch's Alpha	Keterangan
Sikap Wajib Pajak (X1)	0,785	Realibel
Motivasi Wajib Pajak (X2)	0,756	Realibel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,757	Realibel
Pengetahuan Perpajakan (X4)	0,777	Realibel
Persepsi Wajib Pajak tentang denda PBB (X5)	0,783	Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Y)	0,762	Realibel

Sumber : Data Primer diolah 2018

1. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Sikap Wajib Pajak diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,785. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,785 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Sikap Wajib Pajak dikatakan reliabel.
2. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Motivasi Wajib Pajak diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,756. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,756 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Motivasi Wajib Pajak dikatakan reliabel.
3. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,757. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,757 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak dikatakan reliabel.
4. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Pengetahuan Perpajakan diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,777. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,777 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Pengetahuan Perpajakan dikatakan reliabel.
5. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,783. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,783 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB dikatakan reliabel.
6. Hasil pengujian diatas menyatakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,762. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,762 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikatakan reliabel.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB dikatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Adapun uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.20801690
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		1.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.165

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya angka *asympSig* (2-tailed) menunjukkan nilai 0,165 lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan (5%) yang artinya bahwa seluruh data dapat dikatakan berdistribusi normal.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *varian inflation factor* (VIF). $VIF = 1 / Tolerance$. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2013). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	.000		
Sikap WP	.397	.384	2.606
Motivasi WP	.633	.528	1.894
Kesadaran WP	.376	.477	2.094
Pengetahuan Perpajakan	.030	.567	1.762
Persepsi WP tentang Denda PBB	.000	.667	1.500

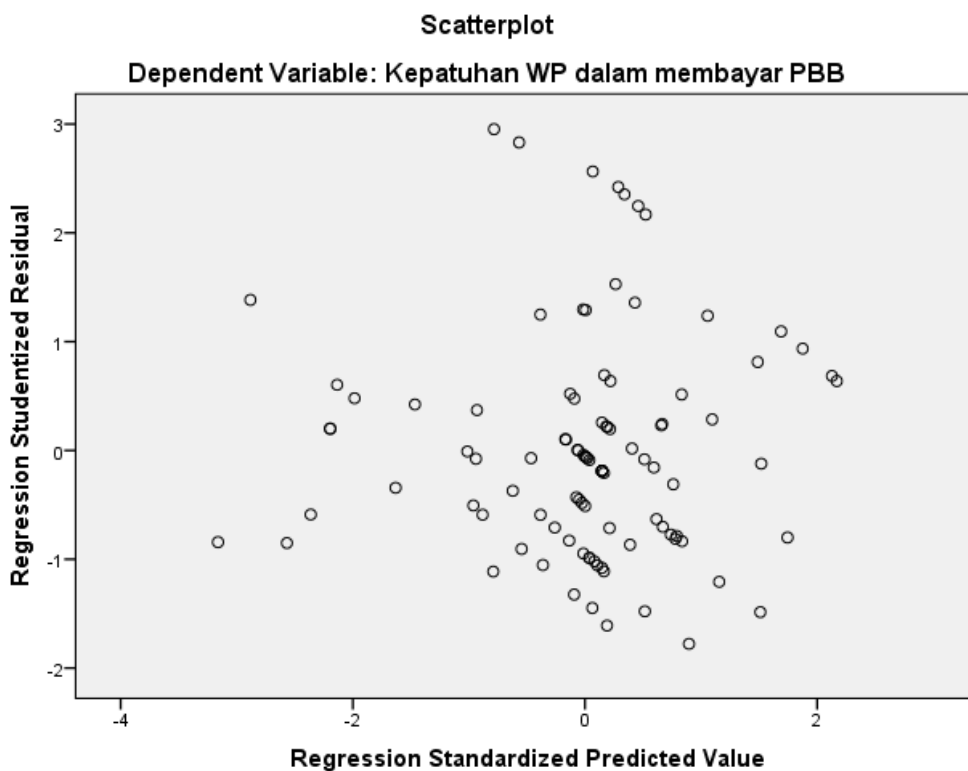
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas hasil analisis menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa harga koefisien VIF untuk semua variabel independen < 10 . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 4 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah 2018

Dalam suatu model regresi yang baik, biasanya tidak mengalami *heteroskedastisitas*. Melalui grafik *scatterplot* dapat terlihat suatu model regresi

mengalami *heteroskedastisitas* atau tidak. Jika terdapat pola tertentu dalam grafik maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*. Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini.

4.2.4 Uji Regresi

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4 8
Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	11.618	3.130
Sikap WP	-.119	.139
Motivasi WP	-.048	.101
Kesadaran WP	-.057	.065
1 Pengetahuan Perpajakan	.213	.097
Persepsi WP tentang Denda PBB	.563	.082

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,618 - 0,119 X_1 - 0,048 X_2 - 0,057 X_3 + 0,213 X_4 + 0,563 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

X1 : Sikap Wajib Pajak

X2 : Motivasi Wajib Pajak

X3 : Kesadaran Wajib Pajak

X4 : Pengetahuan Perpajakan

X5 : Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

e : Koefisien *error*

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 2,185, diartinya bahwa jika variabel Sikap Wajib Pajak (X1), Motivasi Wajib Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4) dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X5) bernilai nol, maka besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(Y) sebesar 11,618.
2. Koefisien variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar -0,119 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sikap wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar -0,119 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
3. Koefisien variabel motivasi wajib pajak (X2) sebesar -0,048 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel motivasi wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar -0,048 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
4. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar -0,057 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menurun sebesar -0,057 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
5. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X4) sebesar 0,213 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan perpajakan menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB meningkat sebesar 0,213 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
6. Koefisien variabel persepsi wajib pajak tentang denda PBB (X5) sebesar 0,563 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel persepsi wajib pajak tentang denda PBB menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB meningkat sebesar 0,563 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika *Adjusted R Square* adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi dependen. Nilai *Adjusted R Square* berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *Adjusted R Square* semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.469	.441	2.266

a. Predictors: (Constant), Persepsi WP tentang Denda PBB, Motivasi WP, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran WP, Sikap WP
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,441 atau 44,1% yang berarti bahwa variabel independen (Sikap WP, Motivasi WP, Kesadaran WP, Pengetahuan perpajakan dan Persepsi WP tentang denda PBB) dapat menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan WP dalam membayar PBB) dan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

4.2.6 Uji F

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$) maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

Tabel 4 10
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	425.901	5	85.180	16.589	.000 ^b
Residual	482.659	94	5.135		
Total	908.560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB

b. Predictors: (Constant), Persepsi WP tentang Denda PBB, Motivasi WP, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran WP, Sikap WP

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Dari tabel 4.10 ANOVA diperoleh F hitung 16,589 dengan probabilitas 0,000. Nilai F tabel yaitu 2,31. Jadi $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($16,589 > 2,31$) atau $\text{sig} < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan WP dalam membayar PBB.

4.3 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan 5% (Ghozali,2011). Bila nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4 11
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.618	3.130		3.712	.000
1 Sikap WP	-.119	.139	-.103	-.851	.397
Motivasi WP	-.048	.101	-.050	-.479	.633
Kesadaran WP	-.057	.065	-.097	-.889	.376
Pengetahuan Perpajakan	.213	.097	.220	2.204	.030
Persepsi WP tentang Denda PBB	.563	.082	.635	6.892	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP dalam membayar PBB

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4.11 diketahui bahwa :

1. Nilai signifikan Sikap WP sebesar 0,397 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
2. Nilai signifikan Motivasi WP sebesar 0,633 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
3. Nilai signifikan Kesadaran WP sebesar 0,376 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
4. Nilai signifikan Pengetahuan perpajakan sebesar 0,030 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.
5. Nilai signifikan Persepsi WP tentang denda PBB sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

Persepsi WP tentang denda PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB.

4.4 Pembahasan

Persamaan regresi linier berganda yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka berikut ini akan disajikan pembahasan pada penelitian ini :

4.4.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Utomo, 2011). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utomo (2011) yaitu tidak terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dibutuhkan pemeriksaan pajak yang lebih detail dan serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

4.4.2 Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shiddiq (2011) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi dalam membayar pajak tidak membuat seseorang menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dapat diketahui dari keadaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak cukup dengan memiliki motivasi dalam membayar pajak saja, melainkan masih perlu adanya faktor faktor pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban perpajakannya.

4.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah, hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri yang makin menurun. Kesadaran wajib pajak bukan merupakan faktor penentu seberapa siap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak adalah dengan membangun iklim agar wajib pajak mau menunaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Para ahli terdahulu percaya bahwa penerimaan pajak akan tercapai jika terdapat sistem yang ketat. Artinya otoritas perpajakan harus melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan pajak dengan ketat.

4.4.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi dan peranan pajak dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan perpajakannya mulai dari tahap yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

4.4.5 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shiddiq (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya memenuhi pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar (Shiddiq, 2011).

Undang-undang dan peraturan perpajakan termasuk UU PBB NO.12 Tahun 1994 secara garis besar berisikan hak dan kewajiban wajib pajak, yang mengatur tindakan-tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh semua wajib pajak. Setiap wajib pajak PBB yang berada dibawah payung hukum atau undang-undang PBB harus mematuhi. Namun, banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada. Oleh sebab itu agar berbagai regulasi yang ada, maka terdapat sanksi untuk para pelanggarnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan variabel independen yaitu sikap, motivasi, kesadaran, pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu di peroleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 responden di Kecamatan Panjang. Metode analisis data menggunakan SPSS Versi 20 dengan metode analisis regresi berganda.

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Persepsi wajib pajak tentang denda pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini hanya meneliti di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sehingga untuk daerah kabupaten dan kota lain yang berbeda memungkinkan akan terdapat perbedaan kesimpulan.
2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrument berdasarkan persepsi dari skor jawaban responden.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasandiatas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik kuesioner. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan teknik wawancara untuk memperkuat hasil penelitian.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan tidak hanya terbatas kecamatan panjang kota Bandar Lampung saja tetapi disarankan agar memperluas area penelitian. Misalnya penelitian pada semua kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung.